

DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Ririh Dian Pratiwi

Lilis Setyowati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *akuntabilitas* kinerja pemerintah Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pegawai negeri sipil pada bagian keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Semarang dengan jumlah *responden* sebanyak 59 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer yang menggunakan data dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji *regresi linear berganda*. Data dianalisis dengan menggunakan software SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) tidak terdapat pengaruh antara penerapan akuntansi keuangan sektor publik terhadap *akuntabilitas* kinerja pemerintah daerah, (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengelolaan keuangan terhadap *akuntabilitas* kinerja pemerintah daerah, dan (3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap *akuntabilitas* kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci: penerapan ASP, pengelolaan keuangan, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan *akuntabilitas* kinerja

ABSTRACT

This study aims to observe several factors that contributed the local government accountability of local government performance the samples were selected by using a purposive sampling method. Involving all the staff of government employees on the financial section at the local government organization around units of Semarang City local government with the total number of 59 respondents. Source of data in this study are primary data. It was the data were collected by using sets of questionnaire measured by using likert scale. The data were analyzed by using multiple linear regression supported by SPSS version 20 software. The results of the study indicated that: (1) there was a not positive and significant effect application of public sector accounting on the accountability of local government performance, (2) there was a positive and significant effect of financial management on the accountability of local government performance, and (3) there was a positive and significant effect control of financial statement quality on the accountability of local government performance

Keywords: *Application of public sector accounting, financial management, control of financial statement quality, and accountability of local government performance.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan usaha pemanfaatan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Seiring dengan otonomi daerah yang terjadi, maka didirikanlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala SKPD.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. *Akuntabilitas* diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik menuju ke arah tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang *akuntabel* akan mendapat dukungan dari *public*. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi pada masyarakat di pihak penyelenggara, *akuntabilitas* mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Akuntabilitas merupakan suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (LAKIP) Kota Semarang 2016 merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kota Semarang dalam membangun Sistem *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (SAKIP) yang baik sebagaimana telah diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Thn 1999 tentang *akuntabilitas* kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Untuk mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi Negara secara menyeluruh dengan menerbitkan dan menyempurnakan sistem administrasi Negara secara menyeluruh, dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah.

Terdapat beberapa kasus dalam kinerja instansi pemerintah yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, diantaranya adalah kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang. Selain itu juga ketidakefisienan kinerja instansi dan ketidakefektifan kinerja (Akbar, 2013).

Informasi yang dihasilkan berupa laporan keuangan harus dapat menunjukkan informasi tentang kinerja dan *akuntabilitas* kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan laporan keuangan ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penetapan ukuran-ukuran yang dapat digunakan adalah adanya nilai ekonomis dan efisiensi dari laporan keuangan serta efektifitas penggunaan sumber daya dan terlihat secara *outcome* yang dihasilkan (Santoso, 2008).

Hasil evaluasi LAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB pada tahun 2016 menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata nilai

evaluasi pada kabupaten/kota dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 rata-rata nilainya 49,87 atau meningkat 2,95 poin dari tahun 2015 yang hanya 46,92.

Walaupun mengalami peningkatan, namun rata-rata nilai pada kabupaten/kota pada tahun 2016 masih dibawah 50, yang artinya masih berada pada kategori C. sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83% dari total seluruh kabupaten/kota masih mendapat nilai dibawah B (www.menpan.go.id).

Rendahnya tingkat *akuntabilitas* pemerintah daerah dikarenakan empat permasalahan utama, yakni tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh oleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi. Hasil evaluasi *akuntabilitas* kinerja ini dapat menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah berorientasi kepada hasil.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik meliputi antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah, perusahaan milik negara, yayasan organisasi politik dan organisasi masa, LSM, universitas dan organisasi *nirlaba* lainnya (Mardiasmo, 2009).

Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang

digunakan untuk mengimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik.

Penetapan standar akuntansi sangat diperlukan untuk memberikan jaminan dalam aspek konsistensi pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya *realibilitas* dan *objektivitas* informasi yang disajikan, *inkonsistensi* dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan audit.

Proses penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi sektor publik merupakan masalah yang serius bagi praktek akuntansi, profesi akuntan, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfaat bagi suatu pihak, namun dapat juga merugikan bagi pihak lain. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan ke seragam standar akuntansi merupakan faktor penting agar diterima pihak-pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi sektor publik itu sendiri.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara *etimologi* pengelolaan berasal dari kata kelola dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi: *akuntabilitas*, *value for money*, kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi, dan pengendalian

Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

Pengawasan menurut Keputusan Presiden nomor 74 tahun 2001 adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.

Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis (Mardiasmo, 2001).

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut LAN dan BPKP (2000) *akuntabilitas* kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan untuk pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup *akuntabilitas* nya masing-masing, karena *akuntabilitas* yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan *akuntabilitas* di lingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya

secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai *katalisator* perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan *akuntabilitas*

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah subyek opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek peneliti atau *responden* (Indriantoro dan Supomo, 2002). Sedangkan sumber datanya adalah primer dari jawaban kuesioner *responden* secara langsung yang dikirim kepada kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bagian keuangan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan pendekatan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006). *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti antara lain: (a) pegawai negeri sipil, (b) pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/keuangan, dan (c) pegawai yang berkerja sebagai kepala bagian dan staf bagian akuntansi / keuangan. Adapun sampel

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 18 OPD di Kota Semarang yang berjumlah 59 *responden* pegawai bagian keuangan di setiap SKPD.

Metode Analisis

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari *akuntabilitas* kinerja sebagai variabel dependen, sedangkan penerapan akuntansi keuangan sektor publik pengelolaan keuangan, dan pengawasan kualitas laporan keuangan sebagai variabel independen.

Bentuk umum dari perumusan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : *Akuntabilitas Kinerja*
 X₁ : Penerapan Akuntansi Keuangan Sektor Publik
 X₂ : Pengelolaan Keuangan
 X₃ : Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan
 b : Koefisien Korelasi
 a : *Konstanta*
 e : *Error*

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,559 ^a	,312	,275	1,088	1,646

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Pengelolaan, Penerapan

b. Dependent Variable: *Akuntabilitas*

Sumber: Data Diolah (2017)

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas, didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,275. Hal ini berarti 27,5% *akuntabilitas* kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota Semarang dapat dijelaskan oleh variabel penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengelolaan keuangan, serta pengawasan kualitas laporan keuangan. Sedangkan 72,5% variabel *akuntabilitas* kinerja pada instansi Pemerintah Daerah Kota Semarang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang tidak terdapat dalam penelitian ini adalah partisipasi

penyusunan anggaran, kualitas SDM, sistem pengendalian intern, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan beberapa faktor eksternal yang dianggap bisa mempengaruhi *akuntabilitas* kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan model regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 16.0. Tampilan hasil uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29,586	3	9,862	8,329	,000 ^b
	Residual	65,126	55	1,184		
	Total	94,712	58			

a. Dependent Variable: *Akuntabilitas*

b. Predictors: (Constant), Pengawasan, Pengelolaan, Penerapan

Sumber: Data Diolah (2017)

Hasil pengujian ANOVA atau uji F pada tabel diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar 8,329 dengan tingkat signifikan 0,000 yang nilainya lebih kecil dari nilai *probabilitas* 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengelolaan keuangan, dan pengawasan kualitas laporan keuangan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap *akuntabilitas* kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing variabel bebas yaitu penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengelolaan keuangan, dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap variabel terikat yaitu *akuntabilitas* kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang. Hasil uji t ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,024	1,559		3,865	,000		
Penerapan	,018	,028	,080	,643	,523	,818	1,223
Pengelolaan	,094	,029	,385	3,225	,002	,878	1,139
Pengawasan	,153	,076	,252	2,000	,050	,785	1,273

a. Dependent Variable: *Akuntabilitas*

Sumber: Data Diolah (2017)

Tabel di atas merupakan hasil dari pengujian variabel penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengelolaan keuangan, dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap *akuntabilitas* kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan $\alpha = 5\%$. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa secara individual variabel penerapan akuntansi keuangan sektor publik memberikan nilai koefisien sebesar 0,643 dengan probabilitas signifikan 0,524 (lebih besar dari nilai probabilitas 0,05). Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel penerapan akuntansi keuangan sektor publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *akuntabilitas* kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang.

Variabel pengelolaan keuangan memberikan nilai koefisien 3,225 dengan probabilitas signifikan 0,002. Nilai t hitung positif menunjukkan bahwa variabel pengelolaan keuangan mempunyai hubungan yang searah dengan *akuntabilitas* kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap *akuntabilitas* kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang.

Berdasarkan hasil uji regresi di atas juga menunjukkan nilai t hitung pada variabel pengawasan kualitas laporan keuangan sebesar 2,000 dengan probabilitas signifikan 0,050 (tidak melebihi dari nilai probabilitas). Nilai t hitung positif menunjukkan bahwa variabel pengawasan kualitas laporan keuangan mempunyai hubungan yang searah dengan *akuntabilitas*

kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap *akuntabilitas* kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Terhadap *Akuntabilitas* Kinerja Pemerintah Daerah

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintah dapat disimpulkan sebagai alat untuk memfasilitasi pelaporan yang semakin transparan dan akuntabel.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta *akuntabilitas*. *Akuntabilitas* kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Kinerja organisasi dapat diarah dengan mengaktifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran,

realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggung jawaban publik (Bastian, 2010).

Pamungkas (2012) menyebutkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap *akuntabilitas* kinerja pada instansi pemerintah. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan *akuntabilitas* kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi, dan obyek pengeluaran.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintahan diharapkan akan dapat memperbaiki *akuntabilitas* kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta *akuntabilitas* publik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor publik tidak berpengaruh signifikan terhadap *akuntabilitas* kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan sumber daya manusia mengenai standar akuntansi pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pengakuan untuk transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dan beban. Walaupun rata-rata untuk variabel penerapan standar akuntansi keuangan sektor publik berada pada kategori baik, tapi pada kenyataannya pemerintah dengan menggunakan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya dapat menunjukkan *akuntabilitas* kinerja yang baik.

Jadi hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi keuangan sektor publik. Padahal penerapan standar akuntansi sektor publik dapat meningkatkan *akuntabilitas* kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah daerah yang lebih baik.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan yang baik membuat aktivitas yang dilakukan oleh

pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan *akuntabilitas* publik. *Akuntabilitas* publik merupakan kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumberdaya publik yang bersangkutan dengannya untuk menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap *akuntabilitas* kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang. *Akuntabilitas* kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggaraan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilannya maupun kegagalannya mengenai pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja.

Dengan adanya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah yang lebih baik dan berkualitas.

Pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pengawasan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah berpengaruh terhadap *akuntabilitas* kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena karena pengawasan yang telah dilakukan memberikan kontribusi yang besar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan dan pemeriksaan kinerja juga merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengawasan kualitas akan mendorong terciptanya *akuntabilitas* kinerja, sehingga akan mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas.

Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan sangat penting untuk dilakukan. Hal

ini dikarenakan laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai *akuntabilitas* pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, social dan politik. Dalam instansi pemerintah pasti akan diawasi oleh pihak internal maupun eksternal dalam setiap proses pencapaiannya, namun sistem pengawasan internal dalam instansipun menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat pada penggunaannya sistem otorisasi yang tepay untuk mengelola keuangannya dalam suatu Organisasi Pemerintah Daerah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan *akuntabilitas* kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang.
- b. Pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan *akuntabilitas* kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang.
- c. Pengawasan kualitas laporan keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan *akuntabilitas* kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang.
- d. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengelolaan keuangan, dan pengawasan kualitas laporan keuangan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan *akuntabilitas* kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang.

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat

beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan hanya pada satu wilayah di Kota Semarang, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.
- b. Dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 27,5%. Sedangkan 72,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan masih kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap *akuntabilitas* kinerja pada kantor instansi pemerintah daerah Kota Semarang.
- c. Kurangnya pemahaman dari *responden* terhadap pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner serta kepedualian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari *responden* dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban *responden*.

Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

- a. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengelolaan keuangan, serta pengawasan kualitas laporan keuangan telah baik dilakukan tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya *akuntabilitas* kinerja yang dihasilkan oleh kantor instansi pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pemahaman dan penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengelolaan keuangan, serta pengawasan kualitas laporan keuangan dalam meningkatkan *akuntabilitas* kinerja.
- b. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel-variabel lain

seperti partisipasi penyusunan anggaran, kualitas SDM, sistem pengendalian intern, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, serta masih banyak hal lainnya yang dapat dijadikan variabel penelitian, sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian penulis.

- c. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode *survey* lapangan, dan lain-lain

DAFTAR PUSTAKA

- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta
- Poerwadaminta. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Edisi Ketiga. Balai Pustaka
- Republik Indonesia. (2007). *PP Republik Indonesia No. 38 tentang Pembagian Uusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta
- Republik Indonesia. (2007). *Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. (2006). *Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. (2005). *PP No. 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Republik Indonesia. (2005). *PP No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. (2005). *PP Republik Indonesia No. 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. (2004). *UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta
- Republik Indonesia. (2004). *UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. (2003). *UU No. 17 tentang Keuangan Negara*. Indonesia
- Rovianyantie, Devi. (2011). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- Sawyer, Lawrence B. 2005. *Internal Auditing*. Edisi 5. Salemba Empat
- www.menpan.go.id
- Yuliani, et al. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol.3 No.2* hal206-220